

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikolore Kota Palu

Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Empowering the Poor in Tondo Village, Mantikolore District, Palu City

Yunus^{1*}, Meldi Amijaya², Ayu Lestari³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Prodi Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Tadulako

(*Email Korespondensi: yunus.fisip@gmail.com)

Abstrak

Latar Belakang: Program Keluarga Harapan (PKH) ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin yang ada di kelurahan tondo kota palu untuk ikut berperan dalam program PKH yang dimana akan memberikan dampak logis bagi kehidupan masyarakat setempat terutama pada peningkatan kualitas hidup melalui kesehatan dan pendidikan yang nantinya diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan yang selama ini masih menjerat masyarakat Indonesia.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran yang jelas tentang Implementasi Kebijakan Program Keluarga harapan (PKH) di kelurahan Tondo Kecamatan Mantikolore Kota Palu. Selanjutnya untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan mantikolore agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat akibat dampak pandemic covid-19 di kelurahan Tondo Kecamatan mantikolore kota palu.

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan agar dapat memperoleh informasi yang mendalam tentang program kemiskinan dan pemberdayaan. Subyek dalam penelitian ini terdiri dari Pendamping PKH, Staf di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikolore Kota Palu Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode obsevasi, interview,dan dokumentasi. Tehnik sampel yang digunakan adalah purposive sampling yang berjumlah lima orang informan yang yang manjadi sasaran dalam PKH adalah masyarakat yang tinggal di Kelurahan Tondo memiliki kriteria miskin, yang sudah ditunjuk oleh pemerintah.

Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan taraf hidup kelurga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, serta mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan; Pemberdayaan; Masyarakat

Abstract

Background: The Family Hope Program (PKH), is expected to provide an opportunity for the poor in the Tondo sub-district, Palu city to take part in the PKH program which will have a logical impact on the lives of the local community, especially in improving the quality of life through health and education. which later is expected to break the chain of poverty that has been ensnaring the people of Indonesia.

Objective: This study aims to identify and provide a clear picture of the Implementation of the Family Hope Program (PKH) Policy in the Tondo Village, Mantikolore District, Palu City. Furthermore, to find out what efforts have been made by the Mantikolore District government in order to improve the economic welfare of the community due to the impact of the COVID-19 pandemic in Tondo Village, Mantikolore District, Palu City.

Methods: This research is a qualitative research with the aim of obtaining in-depth information about poverty and empowerment programs. The subjects in this study consisted of PKH Facilitators, staff in Tondo Village, Mantikolore District, Palu City. The data collection methods used by the author were observation, interview, and documentation methods. The sampling technique used was purposive sampling, which consisted of five informants who were the targets of the PKH. The people who lived in the Tondo Village had poor criteria, which had been appointed by the government.

Results: This study shows that the implementation of the Family Hope Program (PKH) is to improve the living standards of beneficiary families through access to education, health, and social welfare services, as well as reducing the burden of spending and increasing the income of poor families.

Keywords: Family Hope Program; Empowerment; Public

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (1). Terdapat banyak upaya pemerintah untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan hakekat tujuan pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah dara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia (2).

Bicara kesejahteraan biasanya tidak lepas dari fenomena kemiskinan. Kemiskinan tidak dapat lagi di pahami sebagai keadaan dimana seseorang kekurangan ekonomi tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar serta adanya perbedaan perlakuan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan yang bermartabat (3).

Fenomena kemiskinan pada bangsa Indonesia dialami sudah jauh sebelum kemerdekaan baik terjadi pada saat zaman kerajaan maupun kolonial, dan hingga saat ini bangsa ini belum lepas dari kemiskinan Telah banyak upaya untuk mengatasi lilitan kemiskinan yang dilakukan pemerintah dari rezim ke rezim (4). Bahkan, upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan sudah banyak dengan aturan, misalnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan memuat strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan dan Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, serta aturan lainnya Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah mengklaim melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia dilaksanakan pertama kali pada tahun 2007 di 7 provinsi 48 kabupaten/kota (5)(6)(7)(8).

Namun kita juga harus memahami bahwa proses pemberantasan masalah kemiskinan melalui PKH bukanlah sebuah proses yang mudah, melainkan sebuah proses yang membutuhkan kemampuan (*political will*), baik dari pemerintah (sebagai unsur pendukung) maupun dari komponen masyarakat itu sendiri.

Yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini bagaimana Program Keluarga harapan (PKH) di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikolore Kota Palu. Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikolore Kota Palu agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Akibat dampak pandemic covid 19.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran yang jelas tentang Implementasi Kebijakan Program Keluarga harapan (PKH) di kelurahan Tondo Kecamatan Mantikolore Kota Palu. Selanjutnya untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan mantikolore agar dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat akibat dampak pandemic covid-19 di kelurahan Tondo Kecamatan mantikolore kota palu.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dimana penelitian ini berusaha untuk menuturkan dan menafsirkan data yang ada. Dasar penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif metode penelitian kualitatif menekankan pada metode penelitian observasi di lapangan dan datanya di analisa dengan cara non statistik meskipun tidak selalu harus menggunakan angka penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.

Jenis penelitian yang digunakan sebagai cerminan dasar perancangan penelitian dalam rangka mendapatkan data adalah jenis penelitian kualitatif. Tipe penelitian deskriptif (penggambaran) adalah suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat ini. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi- kondisi yang ada sekarang

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari informan. Adapun informan dalam penelitian ini yang informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Lurah Tondo, 2) Kasi Kesejahteraan Sosial, 3) Ketua PKH, 4) Penerima

PKH, 5) Masyarakat yang tidak menerima PKH, 6) Pendamping PKH di Kelurahan Tondo. Dan sumber data sekunder yaitu melalui penelusuran pustaka dan dokumen-dokumen dari berbagai sumber resmi lain, surat keputusan, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, data statistik, data kelembagaan (pemerintah dan lembaga lainnya). Adapun Teknik pengumpulan data melalui observasi (*observation*), wawancara (*interview*), dokumentasi (*documentation*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikolore kota Palu Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) . Dari data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikolore kota Palu, Semuanya sudah berjalan sejak tahun 2013 yang lalu, tujuan dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sendiri yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama pada kelompok RTM di Di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikolore kota Palu.

Di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikolore Kota Palu Adapun proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikolore Semuanya memelalui beberapa proses yaitu : 1) Diawali dari pengiriman data warga miskin ke Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten, BPS membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2) Data tersebut akan diolah tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat Kota, Kecamatan, yang difasilitasi oleh Kota, Camat, Kelurahan dan BPS memberikan data untuk disimpan Dinas Sosial dan PT. Bank Rakyat Indonesia. 3) Selanjutnya Dinas Sosial mengverikasi data yang akan menerima bantuan PKH ke PT. Bank Rakyat Indonesia, Dinsos memberikan data penerima PKH beserta kartu Kompensasi bantuan kepada Pendamping PKH tingkat Koordinator Kelurahan, 4) Koordinator pendamping memberikan kartu penerima bantuan PKH kepada Penerima bantuan PKH, 5) Pendamping memberikan kartu penerima bantuan PKH kepada Kelurahan, 6) Lurah memberikan kartu kompensasi bantuan kepada warga yang menerima Bantuan Program Keluarga Harapan, 7) Pembukaan rekening penerima PKH oleh Bank Rakyat Indonesia, 8) Untuk pengambilan dana dilakukan di Bank Rakyat Indonesia dengan Rekening atau ATM masing-masing penerima Bantuan Program Keluarga Harapan dengan jumlah yang telah ditetapkan tanpa ada pengurangan atau biaya apapun.

Berikut ini hasil temuan dari wawancara tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikolore Kota Palu. Adapun yang menjadi Informan adalah sebagai berikut : Wawancara dengan Bapak, AMIYUDDIN DJAFAR, S.SOS. Koordinator PKH Kota Palu., Bahwa pelaksanaan bantuan Program Keluarga Harapan sesuai dengan data yang ada dengan peserta PKH kurang lebih 2100 dari tahun 2015. Kalau masalah tujuan kita ngikuti ketentuan pusat dengan ada jangka 76 pendek dan ada jangka panjangnya kalo jangka pendeknya disegi kesehatannya PKH itu harus hidup sehat hidup bersih dan jangka panjang rata-rata mereka ini mendapatkan KIS jadi kalo mau berobat sudah tidak bayar lagi gratis. Sasaran PKH adalah keluarga yang berdasarkan kategori miskin karena PKH ini bantuan yang bersyarat balita, pendidikan, lansia dan penyandang disabilitas. 65 Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Tujuan dari PKH ini antara lain adalah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, serta mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin.

Wawancara dengan Bapak MUHAMMAD AKBAR, Amd. Pendamping PKH Kecamatan mantikolore Kelurahan Tondo Kota Palu Berdasarkan sosialisasi sudah dilaksanakan dari awal datangnya PKH, pertama dari Dinsos dulu ya sudahnya turun kependamping terus itu langsung terjun kemasyarakatnya setelah data sudah diterima. Tugas yang dilakukan yang pertama yaitu tadi sosialisasi, memvalidasi, pertemuan kelompok, memutakhirkan data yang dilakukan 3 bulan sekali. Penyaluran dilakukan 3 bulan sekali yang berbeda hanya tanggal yang belum pasti. Dari program yang diadakan adalah senam setiap hari minggu, kerja bakti setiap hari jumat untuk lansia dan kewajiban. Amiyuddin Djafar, Koordinator PKH.

Wawancara pada tanggal 15 Juli 2022 peserta PKH memeriksakan kesehatan untuk anak balita dan mengikuti kegiatan kesejahteraan sosial bagi lansia. Pendamping PKH bertujuan memastikan anggota keluarga penerima manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH. Memfasilitasi keluarga penerima manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Peserta PKH Berdasarkan wawancara dengan penerima bantuan Program Keluarga Harapan Ibu Wana Kelurahan Tondo mulai mendapatkan Bantuan Program Keluarga Harapan Dari Tahun 2015 dengan mendapatkan bantuan komponen kesehatan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun sampai sekarang. Akan tetapi.

Wawancara dengan ibu Inang tidak sering mengikuti kegiatan sosialisasi karena tidak ada kegiatan PKH, dan kewajiban peserta PKH ibu Desy, melaksanakannya manfaat dan perubahan yang dirasakan sangat membantu mencukupi keperluan anak sekolah dan balita. Menurut Ibu Syarifah di kelurahan Tondo sejak tahun 2015 mendapatkan bantuan komponen kesehatan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan jumlah bantuan Rp.2.500.000 setiap 3 bulan sekali pengambilan dalam setahun, iya ibu hisnawati Pendamping Program Keluarga Harapan.

Wawancara pada tanggal 14 Juli 2022 Ibu Suparmi, Peserta Program Keluarga Harapan, wawancara pada tanggal 18 Juli 2022 pernah mengikuti sosialisasi terkait PKH. Bantuan PKH yang di dapat hanya bisa digunakan untuk kebutuhan pokok dan belum bisa dikatakan untuk pengentasan kemiskinan. Ibu Juariah Desa Bukit Peninjauan 1 dari tahun 2015 mendapatkan komponen kesejahteraan sosial lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dalam pertemuan kelompok yang dibahas tentang pengeluaran dana PKH dan penggunaan dana dari bantuan PKH tersebut. Program pkh untuk lansia adalah setiap minggunya diadakan senam jantung, kerja bakti di balai desa dan mengikuti pertemuan kelompok akan tetapi ibu juariah tidak mengikuti kewajibannya.

Wawancara dengan Ibu Ningsih Kelurahan Tondo mendapatkan bantuan dari tahun 2015 mendapatkan bantuan komponen kesejahteraan sosial lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dengan jumlah 2.500.000 setiap 3 bulan sekali dalam setahun dan tidak pernah mengikuti kegiatan dalam bidang kesejahteraan sosial dikarenakan faktor sudah tua, tidak sanggup mengikuti banyaknya, Ibu Mimin kelurahan tondo mendapatkan bantuan komponen kesehatan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan jumlah bantuan Rp.2.500.000 setiap 3 bulan sekali pengambilan dalam setahun, senang sekali mendapatkan bantuan pkh.

Wawancara dengan ibu Ika, Peserta Program Keluarga Harapan, wawancara pada tanggal 17 Juli 2022 Diana Peserta Program Keluarga Harapan, Wawancara pada tanggal 14 Juli 2022 karena membantu untuk memenuhi kebutuhan balita dan mengikuti kegiatan program posyandu setiap bulannya. proses pengentasan kemiskinan mungkin sangat sulit dilakukan karena bantuan PKH hanya bisa digunakan untuk kebutuhan pokok. yang mendapatkan bantuan komponen kesejahteraan sosial lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun. PKH dapat menunjang proses pengentasan kemiskinan karena kenapa bantuan pkh sangat membantu perekonomian bagi orang lansia dimana untuk bekerja saja mereka tidak mampu lagi. pengentasan kemiskinan karena bantuan PKH hanya dapat digunakan sebagai kebutuhan pokok saja, tetapi tidak semua penerima manfaat mengalokasikan bantuan PKH belum sesuai dengan aturan dan ketentuan PKH.

Wawancara dengan Ibu Leni mendapatkan bantuan kesehatan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dari tahun 2015 dengan jumlah bantuan Rp.2.500.000 setiap 3 bulan sekali pengambilan setiap tahunnya. Dengan adanya bantuan PKH dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok dan bisa dikatakan sebagai pengentasan kemiskinan. Kewajiban PKH memeriksakan kesehatan ke posyandu setiap bulannya saya selalu hadir, Ibu Suliem Desa Sumber Arum mendapatkan bantuan komponen kesejahteraan sosial lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun. dimana dengan faktor usia ibu Suliem sehingga tidak bisa bekerja lagi dengan adanya PKH dapat membantu perekonomiannya walaupun hanya 3 bulan sekali pengambilan dalam setahun. Untuk mendapatkan bantuan komponen kesejahteraan sosial lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun. PKH dapat menunjang proses pengentasan kemiskinan karena kenapa bantuan pkh sangat membantu perekonomian bagi orang lansia dimana untuk bekerja saja mereka tidak mampu lagi. Peserta Program ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan belum terlaksana dengan baik, karena sebagian peserta PKH tidak memeriksa kesehatan untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dan tidak mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan sosial seperti senam dan kerja bakti untuk usia 60 (enam puluh) tahun ke atas setiap bulannya. Seharusnya pihak pendamping melihat

faktor usia dari peserta PKH dan membuat program yang lebih relevan untuk komponen kesejahteraan sosial terutama untuk lansia dan untuk komponen kesehatan anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun peserta PKH mempunyai kesadaran untuk memeriksakan anaknya ke posyandu dan pendamping PKH untuk lebih membuat kegiatan penyuluhan tentang manfaat kesehatan, meskipun peserta PKH tidak aktif tetapi bantuan rutin tetap diterima. memandang bahwa kemiskinan tidak dapat dihilangkan namun masih ada upaya untuk meminimalisir kemiskinan agar kehidupan sejahtera dapat diraih.

Usaha untuk pengentasan kemiskinan adalah kerja dan usaha yang diwajibkan atas setiap individu yang mampu. Dalam Islam setiap orang yang hidup dimuka bumi ini berkaitan dengan adanya program bantuan PKH, dimana meskipun keluarga yang kurang mampu mendapat bantuan PKH namun mereka tetap harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena bantuan PKH ini hanya bersifat membantu untuk meringankan kebutuhan kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial untuk lansia dan bukan untuk memenuhi secara keseluruhan kebutuhan kehidupan keluarga yang kurang mampu. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari teori kewajiban individu sudah memenuhi usaha terhadap pengentasan kemiskinan melalui perogram PKH.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan taraf hidup kelurga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, serta mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin.

SARAN

Rekomendasi saran, di setiap Kelurahan wajib dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) sebagai petugas pendataan dan pengelolaan data profil Desa dan Kelurahan. Dan yang paling penting agar disediakan tenaga pendamping dari Pemerintah Pusat serta sarana internet sebagai pusat informasi, pelatihan operator dan pengumpulan data dan laporan hasil kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Solikaturun S, Masruroh Y, Zuber A. Kemiskinan Dalam Pembangunan. *J Anal Sociol.* 2014;3(1):70–90.
2. Nasional DP. Undang-Undang Republik Indonesia. No 20 Tahun 2003 tentang Sist Pendidik Nas. 2003;
3. Henry OK, Sidabutar YFD, Hermanto B. KAJIAN FAKTOR NATURAL DAN KULTURAL TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA MEDAN (MEDAN UTARA). *J Potensi.* 2022;2(2).
4. Ibrahim I. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN DENGILU KABUPATEN POHUWATO. *Madani J Polit Dan Sos Kemasyarakatan.* 2022;14(1):113–37.
5. Tanya BL, Simanjuntak YN, Hage YM. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial. Jakarta; 2004.
6. Undang Undang RI. Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Republik Indones. 2011;
7. Nisa M. Peranan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mewujudkan keluarga sakinah menurut Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan: Studi di Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim; 2017.
8. Michele V. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FAKIR MISKIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN. *LEX Priv.* 2020;8(3).